

jurnal **RECHTSVINDING**

Media Pembinaan Hukum Nasional

B 6

Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui Reformasi Pembangunan Hukum dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan

Muh. Risnain

Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi

Imas Sholihah

Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat

Suharyo

Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Ananda Prima Yurista

Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia

Ibnu Sina Chandranegara

Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru

Asma Karim dan Dayanto

✓ Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil

Ahmad Redi

Restoratif Justice dalam Pemidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara

Budi Suhariyanto

Peranan Hukum Nasional dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia

Eko Noer Kristiyanto

**Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI**

*Rechts*VINDING

ISSN 2089-9009

Media Pembinaan Hukum Nasional

Jurnal RechtsVinding merupakan majalah ilmiah hukum yang memuat naskah-naskah di bidang hukum.
Jurnal RechtsVinding terbit secara berkala tiga nomor dalam setahun di bulan April, Agustus, dan Desember.

- Pembina**
Adviser : Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S.H., M.Hum
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
- Pemimpin Umum**
Chief Executive Officer : Pocut Eliza, S.Sos., S.H., M.H.
Kepala Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional BPHN
- Wakil Pemimpin Umum**
Vice Chief Executive Officer : Eko Suparmiyati, S.H., M.H.
- Pemimpin Redaksi**
Editor in Chief : Apri Listiyanto, S.H. (Hukum Pidana, BPHN, Jakarta)
- Anggota Dewan Redaksi**
Editorial Board : Dr. Subianta Mandala, S.H., LL.M. (Hukum Internasional, BPHN, Jakarta)
Arfan Faiz Muhlizi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara, BPHN, Jakarta)
Nunuk Febriananingsih, S.H., M.H. (Hukum Lingkungan, BPHN, Jakarta)
Tyas Dian Anggaraeni, S.H., M.H. (Hukum Bisnis, BPHN, Jakarta)
Erna Priliastari, S.H., M.H. (Hukum Bisnis, BPHN, Jakarta)
- Mitra Bestari**
Peer Reviewer : Prof. Dr. Sulistyawati Irianto, S.H., L.L.M.
(Antropologi Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta)
Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H. (Hukum Tata Negara, Staf Ahli Kemenkumham, Jakarta)
Dr. Sidharta, S.H., M.H. (Hukum Bisnis, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)
Dr. M. Hadi Subhan, S.H., M.H. (Hukum Perdata, Universitas Airlangga, Surabaya)
Prof. Tirta Nugraha Mursitama, S.H., LL.M., Ph.D
(Hukum Internasional, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)
Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo S.H., M.S.
(Hukum Acara, Kapuslitbang Kumdil MA, Jakarta)
Prof. Dr. H. Muhammad Fauzan, S.H., M.Hum.
(Hukum Tata Negara, Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto)
- Redaktur Pelaksana**
Managing Editor : Viona Wijaya, S.H.
- Sekretaris**
Secretaries : Endang Wahyuni Setyawati, S.E.
- Tata Usaha**
Administration : Masnur Tiurmaida Malau, S.H., M.H.
Alice Angelica, S.H., M.H.
Heny Handayani, S.H., M.Si
Lewinda Oletta, S.H.
Sakti Maulana, S.H.
- Desain Layout**
Layout and cover : Sakti Maulana, S.H.
- Sikulasi dan Distribusi**
Circulation and Distribution : Yerico Kasworo, S.H.

Alamat:

Redaksi Jurnal RechtsVinding
Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional
Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Telp.: 021-8091908 ext.105, Fax.: 021-8011754
e-mail: jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id; jurnalrechtsvinding@yahoo.co.id; jurnalrechtsvinding@gmail.com
website: www.rechtsvinding.bphn.go.id

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi.....	i-ii
Daftar Abstrak	
Peningkatan Daya Saing Bangsa melalui Reformasi Pembangunan Hukum dalam Mewujudkan Cita Negara Kesejahteraan Muh. Risnain	291-304
Kebijakan Hukum Pembangunan Kawasan Perbatasan melalui Infrastruktur Berbasis Teknologi Imas Sholihah.....	305-321
Otonomi Khusus di Papua dan Aceh sebagai Perwujudan Implementasi Peranan Hukum dalam Kesejahteraan Masyarakat Suharyo.....	323-337
Implikasi Penafsiran Kembali Hak Menguasai Negara terhadap Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Ananda Prima Yurista	339-358
Purifikasi Konstitusional Sumber Daya Air Indonesia Ibnu Sina Chandranegara.....	359-379
Perlindungan Hukum dan Pengembangan Potensi Indikasi Geografis Minyak Kayu Putih Pulau Buru Asma Karim dan Dayanto	381-398
Dilema Penegakan Hukum Penambangan Mineral dan Batubara Tanpa Izin pada Pertambangan Skala Kecil Ahmad Redi.....	399-420
Restoratif Justice dalam Pidanaan Korporasi Pelaku Korupsi Demi Optimalisasi Pengembalian Kerugian Negara Budi Suhariyanto	421-438
Peranan Hukum Nasional dalam Penyelenggaraan Kompetisi Sepak Bola Profesional di Indonesia Eko Noer Kristiyanto	439-453

Biodata Penulis

Indeks

Pedoman Penulisan Jurnal RechtsVinding

DILEMA PENEGAKAN HUKUM PENAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA TANPA IZIN PADA PERTAMBANGAN SKALA KECIL

(Dilemma of Law Enforcement in Small Scale Illegal Mining)

Ahmad Redi

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara
Jalan Letjen S Parman No. 1, Grogol, Jakarta Barat, 11440
Email: ahmadr@fh.untar.ac.id

Naskah diterima: 9 Februari 2016; revisi: 24 November 2016; disetujui: 25 November 2016

Abstrak

Pertambangan tanpa izin (PETI) merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 158 dan Pasal 160 UU Minerba. Namun, penegakan hukum terhadap PETI menjadi dilema bagi aparat penegak hukum karena eksistensi PETI terkait dengan permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat miskin yang berada disekitar wilayah pertambangan. Bahkan 77% (tujuh puluh tujuh persen) penambang PETI mengalami peningkatan kesejahteraan akibat kegiatan PETI. Tulisan ini akan menganalisis faktor penyebab terjadinya PETI, dampak yang ditimbulkan, dan solusi kebijakan penegakan hukum PETI. Metode penelitian yaitu metode *socio legal research*. Adapun jawaban dari permasalahan di atas, yaitu, pertama, faktor penyebab PETI, antara lain, faktor masalah regulasi, faktor kapasitas birokrasi perizinan, faktor pembinaan dan pengawasan yang normatif, faktor kendala penegakan hukum, dan faktor sosial ekonomi. Dampak dari PETI, antara lain adalah dampak kerusakan lingkungan hidup, dampak penerimaan negara, dan dampak konflik sosial. Kebijakan penegakan hukumnya, yaitu penerapan kebijakan utilitarianisme dan kebijakan pemidanaan sebagai *ultimum remedium*. Di bagian akhir artikel terdapat saran agar aparat penegak hukum harus mempertimbangkan penegakan hukum non-penal terhadap PETI dan pemerintah harus melakukan pembinaan dan pengawasan agar PETI dapat menjadi usaha yang sah.

Kata Kunci: ekonomi, penegakan hukum, PETI

Abstract

Illegal mining (PETI) is a criminal offense under Article 158 and Article 160 of the Mining Law. However, law enforcement against illegal mining is a dilemma for law enforcement officers because the existence of illegal mining associated with impoverished communities' social and economic problems around the mining area. Even the 77% (seventy seven percent) of illegal miners have increased prosperity as a result of illegal mining activities. This paper will conduct a study regarding the causes of PETI, the impact of PETI, and the solution of policy enforcement for PETI. The research method is the method of socio-legal research. As for the answer to the problems above, namely, first, the causes of illegal mining, among others, the regulatory issues factor; capacity of bureaucratic licensing factor; normative guidance and supervision factor; problem of law enforcement factor; and socio-economic factor. The impact of illegal mining, among others, the impact of environmental degradation; the impact of state revenues; the impact of social conflict. The law enforcement policy are implementation of utilitarianism principle and criminalization as *ultimum remedium*. At the end of the article there is recommendations that law enforcement officers should consider non-penal law enforcement against illegal mining and the government has to provide guidance and supervision so that illegal mining could be a legitimate business.

Keywords: economy, law enforcement, illegal mining